

Judul : Perpres ojol segera terbit: mitra tak lagi di posisi lemah
Tanggal : Minggu, 02 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perpres Ojol Segera Terbit

Mitra Tak Lagi Di Posisi Lemah

ANGGOTA Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro mendukung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk melindungi para pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah dalam menjawab keresahan dan tuntutan kesejahteraan para mitra pengemudi.

Dia menilai, Perpres tersebut akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi para pengemudi ojol yang selama ini berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi. "Perpres ini memastikan mitra pengemudi tidak terus berada dalam posisi lemah di tengah persaingan industri transportasi daring yang sangat ketat," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Perpres Ojol. Aturan itu akan menyangkut dasar pemberian tarif, perlindungan dan kesejahteraan untuk para pengemudi.

"Pemerintah akan berkomunikasi dengan semua pihak termasuk perusahaan jasa aplikasi atau

aplikator dan pengemudi ojol dalam penyusunan Perpres itu," kata Prasetyo di Istana Negara, Jumat (24/10/2025).

Syafiuddin melanjutkan, Perpres itu akan mengatur secara lebih adil soal pembagian hasil, potongan aplikasi, dan standar keselamatan kerja di lapangan. Karena, pengemudi ojol memiliki peran vital dalam sistem transportasi nasional. Utamanya sebagai penghubung sektor jasa dan perdagangan digital.

Karena itu, negara wajib hadir untuk memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan yang seimbang antara aplikator dan pengemudi. "Mitra ojol adalah tulang punggung mobilitas masyarakat di era digital. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang jelas dan adil," tandas politikus PKB ini.

Selain itu, Syafiuddin mendorong agar penyusunan Perpres melibatkan perwakilan pengemudi dan aplikator. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif atau terbuka dan dapat diterapkan secara efektif



Syafiuddin Asmoro

di lapangan.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, rancangan Perpres Ojol akan difokuskan pada perlindungan bagi para mitra pengemudi. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pekerja sektor digital yang jumlahnya terus meningkat. "Concern kita adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi ojek online," ujarnya.

Yassierli menyebut, bentuk perlindungan yang akan diatur

meliputi jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Aturan ini juga diharapkan dapat menghadirkan transparansi hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. "Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara," tegas politikus PKS ini.

Menurut Yassierli, saat ini penyusunan Perpres Ojol masih menunggu pembahasan teknis antar-kementerian. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi mitra ojol tercakup dengan baik. "Aturan tersebut kemungkinan akan berbentuk Perpres dan ditargetkan dapat segera dirilis," kata dia.

Sementara, Direktur Public Affairs & Communications PT Gojek Tokopedia (GoTo) Ade Mulya mengatakan, pihaknya sepenuhnya mendukung inisiatif Pemerintah menciptakan landasan regulasi. Diharapkan, regulasi akan menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi dalam industri transportasi daring di Indonesia.

"Penyusunan Perpres ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra. Tujuannya untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital.

Dia mencontohkan, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini. "Inisiatif ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang memastikan penghargaan atas kinerja mitra dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan," kata Ade. ■ TIF